

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REKRUITMEN DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST

**Reza Yasin**

Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya  
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

**Abstract:** This study aims to determine the implementation of the recruitment policy of the system Computer Assisted Test (CAT). Factors influencing the XII Regional Office of State Personnel Board Pekanbaru. Key informant was a member of the executive committee of the examinees. Data collecting technique is interview, observation and documentation. Analysis of data using an interactive model. The results showed government policy implementation Computer Assisted Test (CAT) in the Regional Office of State Personnel Board XII Pekanbaru has been implemented well. It is influenced by the process smooth communication between all parties and human resources are very good in terms of quality.

**Keywords:** Implementation of Government Policy, Computer Assisted Test (CAT).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rekrutmen dengan system *Computer Assisted Test (CAT)*. dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Informan kunci adalah anggota panitia pelaksana peserta ujian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses komunikasi yang lancar di antara semua pihak dan sumber daya manusia yang sangat baik dari segi kualitas.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan Pemerintah, *Computer Assisted Test (CAT)*.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah dua kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan Pegawai Sipil Negara (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS yang diharapkan oleh Undang-Undang ini adalah PNS memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, PNS/ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan PNS yang berkualitas tersebut di atas, harus dimulai dengan proses rekrutmen yang transparan, objektif dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek-praktek KKN dan tidak dipungut biaya. Seiring dengan itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Salah satu pengembangan *E-Government* yang dilakukan adalah implementasi sistem *Com-*

*puter Assisted Test (CAT)* yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Langkah tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan proses rekrutmen CPNS.

*Computer Assisted Test (CAT)* mempunyai banyak keunggulan diantaranya peserta tes dapat mendaftarkan diri melalui internet, peserta tes dapat dinilai langsung sesuai hasil yang diperoleh, komputer menyediakan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar (Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik dan Tes Skala Kematangan), penilaian dilakukan secara objektif, peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil (score) yang diperoleh. Keuntungan lain dari penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)* dalam proses seleksi yaitu hasil yang diperoleh lebih valid, meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN, dan mengurangi semua bentuk kecurangan. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menyelenggarakan sistem *CAT* untuk menyeleksi CPNS dari pelamar umum pertama kali tahun 2013. Pada tahun 2013 belum seluruh instansi pusat maupun daerah menerapkan sistem *CAT*. Landasan hukum implementasi sistem *CAT* pada tahun 2013 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013. Pada tahun 2014 seluruh instansi pusat dan daerah harus menerapkan sistem *CAT* untuk merekrut CPNS nya. Pada tahun 2014 inilah yang menjadi fokus penelitian karena seluruh instansi wajib menggunakan *CAT* sebagai metode seleksi/rekrutmen CPNS. Kewajiban menggunakan *CAT* tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014. Pada lampiran permenpan poin D nomor 11 disebutkan bahwa seleksi/tes kompetensi dasar CPNS dilakukan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau menggunakan sistem *CAT*

Uji Kompetensi Guru (UKG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk teknis pelaksanaan *CAT* di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berlandaskan Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan *Computer Assisted Test* Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014.

Fenomena yang terjadi pada penerapan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah bahwa sistem *CAT* ini merupakan sistem seleksi yang baru dan belum seluruh masyarakat paham bagaimana sistem ini bekerja. Masyarakat yang belum paham masih bertanya-tanya dan menganggap sistem ini masih seperti sistem seleksi CPNS lama yang sarat KKN dan kecurangan. Sebagian masyarakat yang belum paham tersebut masih beranggapan sistem *CAT* ini masih bisa menyuap oknum tertentu sehingga nantinya mereka bisa lulus menjadi CPNS. Waktu yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan seleksi CPNS yakni hanya 3 bulan (Oktober sampai dengan Desember 2014). Dalam waktu tiga bulan tersebut seleksi CPNS menggunakan *CAT* di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru yaitu Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau harus selesai diselenggarakan. Seleksi tersebut harus diselenggarakan karena berkaitan dengan APBN/APBD Tahun 2014 yang hanya boleh diserap sampai dengan bulan Desember 2014. Dengan terbatasnya komputer yang dimiliki Kanreg XII BKN Pekanbaru dan singkatnya waktu untuk menyelenggarakan seleksi CPNS menggunakan *CAT*, maka waktu pelaksanaan *CAT* sangat padat, sampai hari sabtu dan minggu *CAT* tetap dilaksanakan. Idealnya waktu penyelenggaraan seleksi CPNS dilaksanakan minimal dalam jangka waktu pelaksanaan 6 bulan. Dengan jangka waktu pelaksanaan 6 bulan tersebut, maka seleksi CPNS dapat dilakukan dengan lebih optimal tanpa terburu-buru karena keterbatasan waktu. Kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do (Dey, 1978). Untuk mengeta-

hui sejauh mana implementasi suatu kebijakan, Edwar III (1980) mengidentifikasi ada faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah aktor yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan yang mempunyai posisi dalam struktur birokrasi untuk mendisposi semua informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan rekrutmen dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui proses wawancara. Informan kunci penelitian adalah Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Kepala bidang informasi kepegawaian, ketua tim kerja seleksi dan peserta ujian (CAT). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik trigulasi dan model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL

### Implementasi Kebijakan Rekrutmen *Computer Assisted Test (CAT)*

Implementasi Kebijakan Pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014. Pada lampiran Permenpan poin D nomor 11 disebutkan bahwa seleksi/tes kompetensi dasar CPNS dilakukan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Pada implementasi Kebijakan Pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru seluruh instansi pusat dan daerah sudah menggunakan sistem CAT dalam proses seleksi/ rekrutmen CPNS. Tidak ada lagi yang

menggunakan sistem lama yakni menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), karena sudah diinstruksikan oleh Permenpan tersebut di atas.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan teknis sudah berpedoman kepada Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014. Langkah demi langkah dari awal sampai akhir sudah seoptimal mungkin berdasarkan Perka tersebut sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain hal tersebut, maka menurut penulis manfaat lain dari adanya Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1). Dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja, 2). Lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal tim, 3). Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam proses terkait, 4). Memberikan keterangan mengenai keterkaitan dengan satu proses kerja dengan proses kerja, 5). Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional tim kerja, 6). Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, 7). Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh anggota sub tim dalam melaksanakan tugas, 8). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual anggota tim secara keseluruhan. 9). Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi, dan 10). Menjamin konsistensi pelayanan seluruh anggota tim baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, proses seleksi/ rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) sudah mengarah ke arah lebih baik. Hal tersebut bisa dikaji

dari mudahnya peserta dan masyarakat luas mendapatkan informasi terkait alur dan hasil ujian mereka secara *real time*. Maksud *real time* di sini adalah ketika ujian sedang berlangsung, masyarakat luas bisa memantau nilai yang diperoleh peserta ujian melalui ruang monitoring di dalam dan luar gedung Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Melalui monitor itu masyarakat luas bisa melihat perubahan atau penambahan nilai ketika peserta sudah memilih dan menyimpan salah satu jawaban. Kemudian ketika peserta sudah selesai ujian secara keseluruhan, maka nilai akhir akan muncul di layar monitor masing-masing peserta. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelebihan atau keuntungan menggunakan sistem CAT yang transparan dan objektif.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan optimal. Dikatakan demikian karena berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pihak dalam penelitian ini memaparkan informasi yang positif. Informasi yang positif tersebut dapat diperoleh tidak hanya berdasarkan opini/ pendapat informan semata namun juga berdasarkan fakta dan data yang terjadi ketika proses implementasi kebijakan pemerintah itu.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)***

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku), dan 4). Struktur birokrasi. Berdasarkan teori Edwards III di atas dan sesuai dengan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah berlangsung secara baik dan optimal. Dikatakan demikian karena proses komunikasi yang dilaksanakan sudah komu-

nikatif dan informatif. Proses komunikasi ini sangat penting karena dengan lancarnya proses ini, baik dari atasan kepada bawahan, maupun dari panitia penyelenggara kepada peserta ujian, maka tujuan dari implementasi kebijakan tersebut akan terwujud dengan lebih cepat dan tanpa kendala yang berarti. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak mengenai proses komunikasi ini juga bisa dijelaskan bahwa sudah ada jalur komunikasi yang jelas di internal panitia penyelenggara. Selain dilakukan secara langsung, proses komunikasi juga dilakukan melalui media *chatting*. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan maka anggota sub tim akan bertanya kepada koordinator, lalu koordinator akan bertanya kepada ketua tim dan terakhir ketua tim akan bertanya kepada penanggung jawab yang juga merupakan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Kemudian jika dikaji dari faktor sumber daya baik sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung yang dimiliki, maka dapat dijelaskan bahwa SDM dan fasilitas pendukung tersebut menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah yang baik. Secara kualitas, Tim Kerja Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang berjumlah 42 orang, sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Anggota sub tim sudah memiliki bekal pemahaman dasar tentang ilmu komputer, anggota sub tim juga merupakan lulusan minimal diploma tiga atau sarjana, sehingga dengan mudah memahami tugas dan fungsi sebagai anggota tim. Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut, maka tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya jika dibahas secara kuantitas, maka perlu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ujian dan jumlah peserta ujian. Jika pelaksanaan ujian dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 10 hari) dengan jumlah peserta yang sangat banyak, maka jumlah anggota sub tim perlu diperbanyak. Namun jika pelaksanaan ujian waktunya kurang dari 10 hari dan peserta ujian tidak terlalu banyak, maka jumlah anggota sub tim tidak perlu terlalu banyak. Kalau personil yang tidak memadai jumlahnya, akan mempengaruhi implementasi

kebijakan (Santoso, 1988).

Selain faktor SDM, fasilitas pendukung yang dimiliki juga sudah memenuhi standar minimal yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa fasilitas sarana pendukung yang dimiliki oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah mencukupi dan memenuhi standar dengan tersedianya 106 unit komputer. Fasilitas pendukung seperti server, komputer, loker dan lain-lain sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Laboratorium CAT tersebut juga sudah dilengkapi dengan CCTV untuk memantau dan merekam setiap aktifitas di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya mengenai disposisi atau kecenderungan/ tingkah laku juga dipandang sebagai salah satu faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Seluruh anggota sub tim/ panitia penyelenggara Implementasi Kebijakan Pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru telah memahami tugas apa saja yang harus dilakukan ketika sebelum, pada saat ujian dan sesudah ujian berlangsung.

Kemudian jika dikaji dari aspek struktur birokrasi juga dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah ada *Standar Operating Procedure (SOP)* yang disusun oleh BKN Pusat yang tercantum dalam Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014. SOP tersebut menjadi pedoman dan acuan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari seluruh penjelasan tersebut pada akhirnya jika dihubungkan dengan teori Edwards III, maka dapat dikatakan komunikasi antar seluruh pihak (pembuat kebijakan

dengan pelaksana kebijakan), para pelaksana memiliki pengetahuan dan memahami serta memberikan respon positif terhadap kebijakan, sudah adanya *Standar Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas pendukung yang lengkap dan sudah memenuhi standar, maka implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru telah terimplementasi dengan baik.

## PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sudah terimplementasi dengan baik karena sudah berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014 serta Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014. Dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, proses seleksi/ rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi lebih obyektif, cepat, transparan, dan terpercaya. Dengan diimplementasikannya kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)*, maka terhindar dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), bentuk kecurangan lain seperti praktek perjokian karena peserta ujian dan masyarakat luas bisa langsung mengetahui nilai atau *score* yang diperoleh peserta ujian tanpa harus menunggu waktu yang sangat lama seperti sistem seleksi menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, antara lain: a). Komunikasi yang dilaksanakan oleh internal Tim Kerja Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan instansi lain dan para peserta ujian telah ber-

jalan dengan lancar dan informatif. Dikatakan demikian karena terlihat dari seluruh informasi yang ingin disampaikan oleh tim kerja tersebut kepada pihak lain sudah tersampaikan sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan pemerintah tersebut sudah terlaksana dengan baik. Komunikasi yang dilakukan bukannya tanpa kendala namun dengan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas, kendala tersebut dapat diselesaikan. b). Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan pemerintah *Computer Assisted Test (CAT)* di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tahun 2014 yakni berjumlah 42 orang secara kualitas sudah cukup karena terdiri dari pegawai-pegawai yang kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk meningkatkan kompetensi maka sebelum ujian anggota tim dibekali dengan berbagai pelatihan dan simulasi sehingga ketika pelaksanaan ujian sudah terbekali dengan informasi yang cukup. Namun jika dikaji dari segi kuantitasnya, maka perlu disesuaikan dengan permintaan instansi lain yang berkoordinasi dengan Kanreg XII BKN Pekanbaru dalam hal seleksi/ rekrutmen CPNS menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*. Jika pelaksanaan ujian dalam waktu yang lama dan peserta ujiannya sangat banyak, maka jumlah anggota sub tim perlu ditambah. Namun jika waktu pelaksanaan ujian lebih singkat dan pesertanya sedikit, jumlah anggota sub tim tidak perlu terlalu banyak. Kemudian fasilitas pendukung implementasi *Computer Assisted Test (CAT)* sudah dianggap sangat mendukung implementasi kebijakan pemerintah tersebut dalam proses seleksi/ rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan sangat mendukung karena fasilitas tersebut sudah memenuhi standar minimal seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan *Computer Assisted Test* Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014. c). Disposisi yang dimaksud merupakan sikap pelaksana yang bersedia atau menerima melaksanakan program. Pada proses implementasi kebijakan pemerintah ini, para anggota sub tim sudah menerima apa

yang diamanahkan kepada mereka. Selain menerima dengan baik para pelaksana sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang akan dilaksanakan sehingga bisa melaksanakan program tersebut dengan optimal. Selain itu para pelaksana tersebut sudah paham terhadap beban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. d). Terkait dengan struktur birokrasi berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa BKN sudah menyusun SOP untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah CAT yakni Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan *Computer Assisted Test* Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014.

#### SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah dalam rekrutmen pegawai dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* telah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas yang cukup dan komunikasi informasi antara panitia pelaksana dengan peserta ujian secara transparan objektif, cepat dan terpercaya. Dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, praktek kolusi, korupsi dan pencokian dapat dihindari. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, perlu penambahan jumlah sumber daya manusia dan fasilitas Komputer yang siap pakai, kalau peserta cukup banyak dan waktu pelaksanaannya memakan waktu yang lama.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dye, R. Thomas. 1978. Cliffs: N.J. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. Englewood.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press Inc, Washington DC.
- Santoso, Amir. 1988. *Analisa Kebijakan Publik*. Suatu pengantar. APII Jakarta.